

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terdiri dari banyak wilayah dengan skala daerah yang relatif kecil menjadikan pembangunan ekonomi di tingkat daerah sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi mencakup berbagai aktivitas dalam sistem perekonomian yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat pengangguran dan kesenjangan, serta mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan (Anggraini & Muchtolifah, 2023). Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama dari berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembangunan ekonomi adalah proses transformasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara atau wilayah. Transformasi ini mencakup perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi menekankan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, termasuk kesehatan, pendidikan, dan keadilan dalam distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi mencerminkan sejauh mana kinerja pemerintah dalam upayanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingginya tingkat pembangunan ekonomi turut menentukan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan dan mengelola hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh pemerintah (Amananti, 2024).

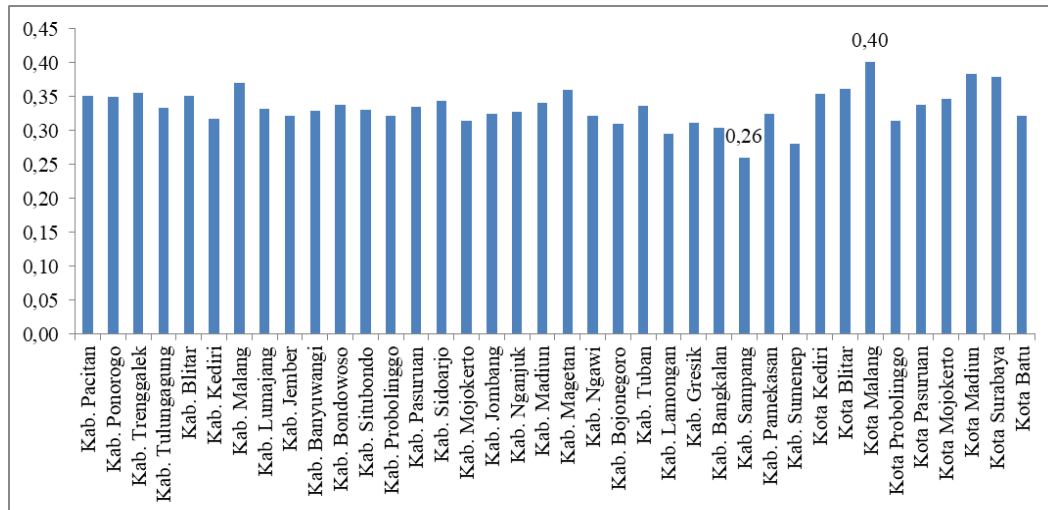
Pembangunan adalah suatu proses yang dilaksanakan dengan kesadaran dan perencanaan yang sengaja dilakukan, meliputi berbagai bidang dalam kehidupan sosial masyarakat.. Pada dasarnya, pembangunan ialah upaya manusia yang disengaja untuk mengubah kondisi dari tingkat kualitas yang kurang baik menuju keseimbangan baru dengan kualitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan pemerataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara berkembang, fokus utama pembangunan sering kali dihadapkan pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi aspek yang paling sering dibahas (Lestari et al., 2021).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, dengan ibu kota berada di Kota Surabaya. Provinsi ini memiliki iklim tropis yang mendukung keberagaman sumber daya alam, terutama di sektor pertanian. Jawa Timur dikenal sebagai daerah agraris sekaligus kawasan industri yang berkembang pesat. Sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Sektor ini meliputi berbagai subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Meskipun sektor industri pengolahan mendominasi PDRB Jawa Timur, kontribusi sektor pertanian tetap signifikan, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja, ketahanan pangan, maupun stabilitas sosial-ekonomi di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian tetap menjadi komponen penting dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur rutin menjadi

penyumbang PDB terbesar $\pm 14\text{--}15\%$ di luar Jawa Barat dan DKI Jakarta menghadapi ketimpangan wilayah dan tuntutan pemulihan pasca pandemi (BPS Jawa Timur, 2025).

Sejak masa Orde Baru hingga sekarang, pemerintah Indonesia terus menempatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai prioritas utama (Kurniawan & Wismadi, 2015). Bukti dari upaya tersebut tampak pada keberhasilan Indonesia yang dalam beberapa dekade terakhir mampu bertransformasi dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. Namun demikian, capaian ekonomi yang terlihat positif ini tidak diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata. Manfaat pertumbuhan lebih banyak dirasakan oleh kelompok berpenghasilan tinggi, sementara masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh porsi yang jauh lebih kecil, sehingga ketimpangan pendapatan tetap besar bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat. Ketimpangan pendapatan sendiri menggambarkan situasi ketika pendapatan yang diterima penduduk tidak tersebar secara seimbang (Yosi Eka Putri & Syamsul Amar, 2015). Untuk mengukur tingkat kesenjangan tersebut digunakan Indeks Gini, yaitu indikator yang nilainya berada pada rentang 0 hingga 1. Nilai mendekati 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang merata, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan adanya ketidakseimbangan pendapatan yang sangat tinggi di dalam suatu wilayah (Utami & Zahrudin, 2022).

**Gambar 1. 1 Indeks Gini Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2018-2024
(dalam persen)**



Sumber : BPS Kab.Probolinggo 2025 (data diolah)

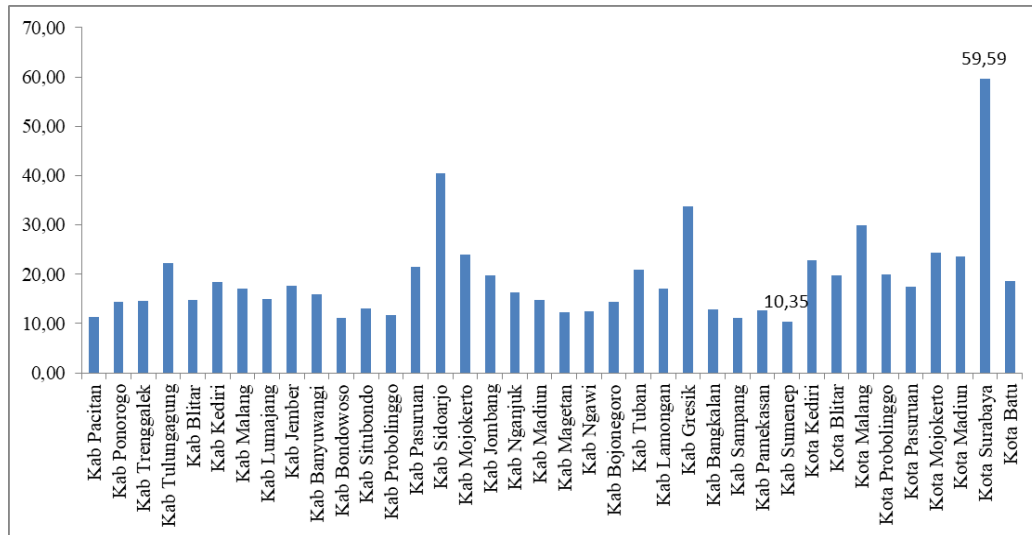
Berdasarkan gambar 1.1 presentase rata rata Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2018-2024. Kota Malang menempati presentase rata rata Indeks Gini tertinggi di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 4,0%. Sedangkan rata rata Indeks Gini terendah adalah Kabupaten Sampang yaitu 2,6%. Perbedaan besarnya persentase Indeks Gini disebabkan oleh struktur ekonomi Kota Malang yang lebih kompleks dan modern, di mana aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata berkembang pesat sehingga menciptakan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi yang meningkat lebih cepat dibandingkan kelompok berpendapatan rendah, sedangkan Kabupaten Sampang memiliki struktur ekonomi yang relatif sederhana dan masih didominasi oleh sektor pertanian serta pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang cenderung seragam sehingga variasi pendapatan antarpenduduk tidak terlalu besar; kondisi ini membuat kesenjangan pendapatan di Kota Malang jauh lebih mencolok

dibandingkan Sampang yang cenderung memiliki distribusi pendapatan lebih merata.

Pada tahun 2001, Indonesia mulai memasuki era baru dalam sistem pemerintahan melalui penerapan otonomi daerah. Penerapan ini ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Kurniawan, 2018). Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya merupakan respons terhadap munculnya aspirasi untuk menciptakan bentuk hubungan baru antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, yang membawa dampak pada pelimpahan sejumlah kewenangan di berbagai sektor.

Salah satu unsur penting dalam penerapan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, yakni pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan. Desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk menjawab aspirasi daerah terkait pengelolaan sumber-sumber keuangan negara, mendorong terwujudnya tanggung jawab dan keterbukaan. Dalam pemerintahan daerah, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memastikan penyediaan layanan publik dasar di seluruh daerah, dan pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Nurhemi dan Suryani dalam Hastuti, 2018).

**Gambar 1. 2 Desentralisasi Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2018-2024
(dalam persen)**



Sumber : DJPK Kemenkeu 2025 (data diolah)

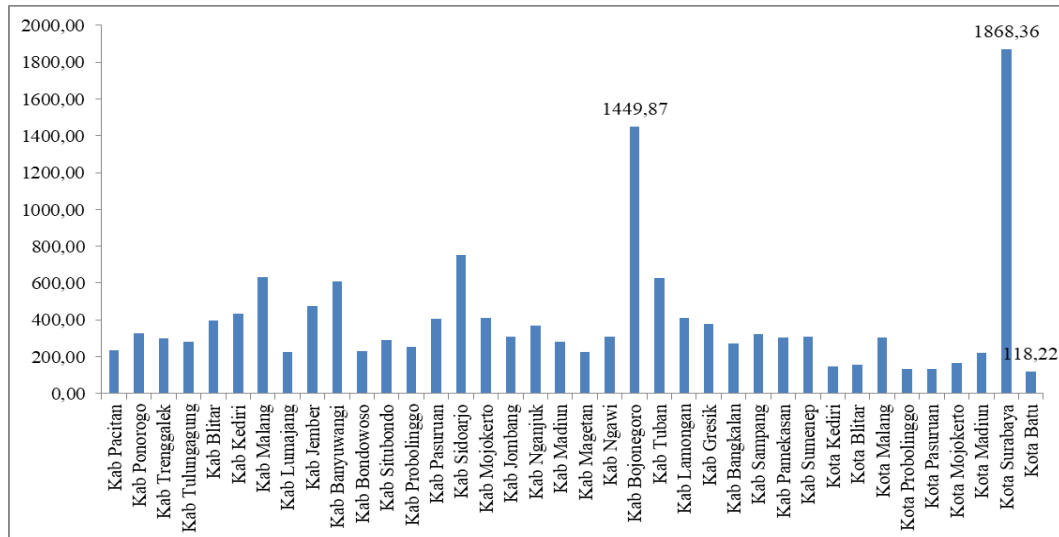
Pada gambar 1.2 Dilihat dari grafik menunjukkan bahwa rata rata Desentralisasi Fiskal kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2024 mengalami peningkatan walaupun nilainya masih rendah. Hal ini menandakan bahwa perlu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta pengalokasian anggaran yang merata. Rata rata nilai desentralisasi fiskal pada tahun 2018-2024 tertinggi ditempati oleh Kota Surabaya sebesar 59,59%, sedangkan rata rata nilai terendahnya dipegang oleh Kabupaten Sampang sebesar 10,35%.

Menurut (Kurniawan, 2018), Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan besaran dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Desentralisasi fiskal merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri

pengalokasian dana guna mendukung pembangunan di wilayahnya. Di Indonesia, pemerintah pusat menyalurkan dana kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah masing-masing.

Selanjutnya, terdapat belanja modal yang juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Belanja modal adalah salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam struktur pengeluaran anggaran, baik pada tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga/instansi. Belanja ini diarahkan guna mendapatkan atau meningkatkan aset tetap serta aset lain yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu periode anggaran. Dengan kata lain, belanja modal tidak hanya bersifat pengeluaran satu kali, melainkan merupakan investasi jangka panjang yang mendukung peningkatan pelayanan publik, efisiensi operasional, serta pertumbuhan ekonomi daerah atau nasional. Dalam kerangka pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan, belanja modal mencerminkan upaya pemerintah atau organisasi dalam membangun fondasi fisik dan teknologi guna mendorong pencapaian tujuan strategis. Pengeluaran ini meliputi, namun tidak terbatas pada, pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, penyediaan sarana dan prasarana umum (seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase), pengadaan kendaraan operasional, peralatan teknologi informasi, serta aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan jenis pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan (Fhathoni, 2017).

**Gambar 1. 3 Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2018-2024
(Dalam Miliar Rupiah)**



Sumber : DJPK Kemenkeu 2025 (data diolah)

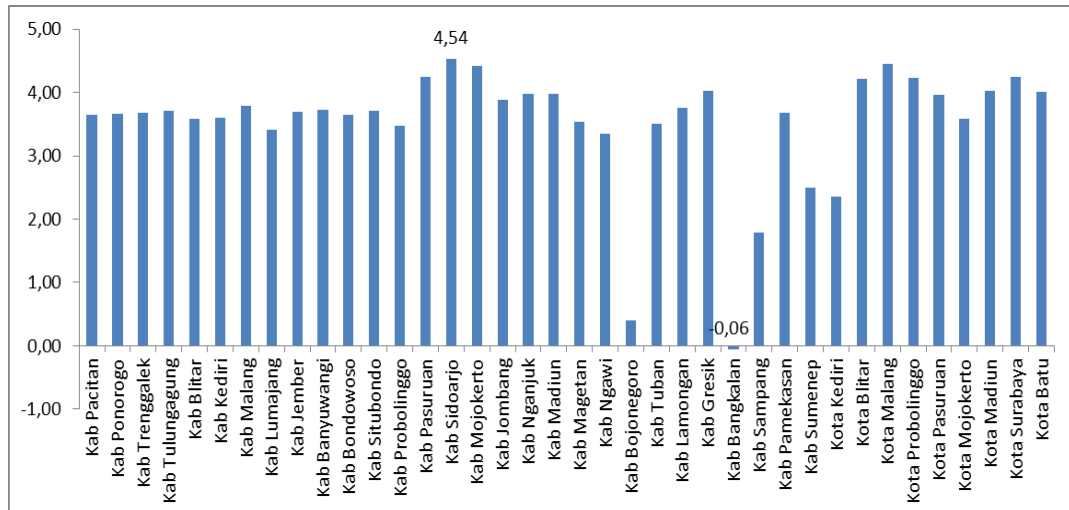
Terlihat dari grafik di atas bahwa belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami fluktuasi. Rata rata Belanja modal tertinggi mencapai 1868,36 Miliar pada Kabupaten Surabaya, dan Kabupaten Bojonegoro sebesar 1449,87%. Rata rata Belanja Modal terendah pada Kota Batu sebesar 69,35 Miliar.

Untuk tahun anggaran berjalan, belanja modal diarahkan pada prioritas-prioritas pembangunan yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses perencanaannya melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), hingga pengesahan APBD/APBN. Realisasi belanja modal dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dokumen pendukung, termasuk Detail Engineering Design (DED), analisis kebutuhan, kelayakan teknis dan lingkungan, serta

ketersediaan lahan (jika diperlukan). Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawa Timur merupakan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menjadikan Jawa Timur sebagai daerah yang benar-benar mandiri, yakni mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Di sisi lain, pembangunan ekonomi tidak hanya dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memerlukan adanya pemerataan dalam pelaksanaannya (Amananti, 2024). Suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila tingkat output yang dihasilkan dari aktivitas ekonominya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Satria, 2016). Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai parameter kunci dalam mengevaluasi suksesnya upaya pembangunan (Happy Adianita, 2023). Meskipun demikian, Jawa Timur juga menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana terlihat dari data BPS pada tahun 2018-2024 sebagai berikut:

Gambar 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2018-2024 (Dalam Persen)



Sumber : BPS Jawa Timur 2025 (data diolah)

Pada gambar 1.4 di atas dikatakan bahwa hampir seluruh daerah rata-rata Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, hampir seluruh daerah mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan beberapa menunjukkan pertumbuhan negatif, yang merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi daerah. Memasuki tahun 2021 dan 2022, terjadi pemulihan ekonomi di sebagian besar kabupaten/kota, ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan yang positif seiring dengan mulai pulihnya sektor perdagangan, industri, dan jasa. Tahun 2023–2024 menunjukkan stabilitas pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan variasi antar daerah. Beberapa kabupaten seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya memperlihatkan pertumbuhan yang relatif tinggi karena didorong oleh aktivitas industri manufaktur, perdagangan besar, dan investasi infrastruktur.

Namun, Kabupaten Bangkalan hingga saat ini Pertumbuhan Ekonominya masih negatif dikarenakan strukturnya yang masih bergantung pada

sektor primer berproduktivitas rendah, minimnya investasi dan industri pengolahan yang dapat menciptakan nilai tambah, serta keterbatasan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia yang membuat aktivitas ekonomi modern sulit berkembang sehingga daerah ini belum mampu mendorong pertumbuhan yang stabil dan positif.

Meskipun demikian, dalam pertumbuhan tersebut juga terdapat tantangan. Fluktuasi ekonomi global, tekanan inflasi, serta dinamika permintaan domestik menjadi faktor yang harus diantisipasi agar ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan. Dengan realisasi pertumbuhan tersebut, sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan strategi pembangunan ekonomi daerah agar dampaknya semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan mendorong produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan menaikkan pendapatan masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur?

5. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
6. Bagaimana pengaruh tidak langsung Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Gini di Jawa Timur melalui Pertumbuhan Ekonomi?
7. Bagaimana pengaruh tidak langsung Belanja Modal terhadap Indeks Gini di Jawa Timur melalui Pertumbuhan Ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ditemukan dari latar belakang di atas tersebut dapat ditemukan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur
4. Untuk menganalisis pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
5. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
6. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Gini di Jawa Timur melalui Pertumbuhan Ekonomi
7. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Gini di Jawa Timur melalui Pertumbuhan Ekonomi

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini setelah ditemukan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka ditemukan manfaat dalam penelitian ini. Manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang membahas pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal terhadap Indeks Gini, dengan mempertimbangkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber informasi dalam merumuskan kebijakan serta menyusun program-program pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang akan saya lakukan, terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya.
2. Penelitian ini menggunakan sumber data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan).

3. Penelitian ini menggunakan variabel Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal, sedangkan masih banyak lagi variabel-variabel lain yang mempengaruhi Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi.